

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam membangun generasi masa depan yang berkualitas, sebagaimana tercermin dari data prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,5% pada tahun 2023 dan berhasil turun menjadi 19,8% pada tahun 2024, meskipun masih jauh dari target jangka panjang sebesar 14,2% pada tahun 2029 (Kemenkes RI, 2025). Fenomena stunting ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan kognitif anak, tetapi juga mengancam produktivitas ekonomi dan daya saing bangsa di masa mendatang. Dalam konteks global, permasalahan serupa juga dialami negara-negara berkembang lainnya, dimana integrasi program gizi dan pendidikan menjadi strategi kunci dalam mengatasi tantangan malnutrisi pada anak usia sekolah (Roothaert et al., 2021).

Data *World Food Programme* menunjukkan bahwa 73 juta anak di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap program makan sekolah, sementara 370 juta anak bergantung pada *school feeding* programs sebagai sumber utama nutrisi harian mereka, menjadikan program ini sebagai jaring pengaman sosial terbesar kedua di dunia setelah imunisasi (*World Food Programme*, 2024).

Sebagai respons strategis terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025 sebagai inisiatif nasional yang bertujuan tidak hanya menurunkan angka stunting tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui integrasi sistemik antara sektor kesehatan dan pendidikan (Qomarrullah et al., 2025). Program MBG merupakan terobosan kebijakan yang melampaui pendekatan konvensional program gizi, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026 untuk melayani 90 juta beneficiaries melalui 30.000 dapur sentral. Program ini mengadopsi pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga

mengintegrasikan pendidikan gizi, pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM, dan penguatan sistem kesehatan masyarakat di tingkat sekolah.

Meskipun kebijakan nasional telah ditetapkan, implementasi di tingkat sekolah menghadapi tantangan kompleks yang mencakup dimensi operasional, manajerial, dan kolaboratif. Kompleksitas ini semakin meningkat ketika mempertimbangkan heterogenitas kondisi geografis, sosial-ekonomi, dan budaya di Indonesia, dimana setiap daerah memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan manajemen yang adaptif dan partisipatif.

Studi komparatif dengan program serupa di negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan *school feeding program* sangat bergantung pada kualitas tata kelola kolaboratif antar *Stakeholder* dan penguatan partisipasi komunitas lokal (Studdert et al., 2004; Roothaert et al., 2021). Pengalaman internasional membuktikan bahwa keterlibatan struktur administratif lokal, penggunaan pangan lokal, dan partisipasi aktif komunitas dalam persiapan makanan menjadi faktor kunci keberlanjutan program bahkan dalam kondisi krisis.

Pembelajaran dari Tanzania menunjukkan bahwa pendekatan *multi-Stakeholder* dalam program *home-grown school feeding* dapat memperkuat kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan program makan sekolah (Roothaert et al., 2021). Pengalaman Brasil melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) juga memberikan pembelajaran bahwa program makan sekolah berskala luas memerlukan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan regulasi yang jelas, serta partisipasi masyarakat agar pelaksanaan program dapat berjalan secara berkelanjutan (FAO, 2013). Dengan demikian, keberhasilan program makan sekolah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kolaboratif antar-*Stakeholder* yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program.

Model kolaborasi *multi-Stakeholder* yang dikembangkan FAO dalam program *school feeding* di Amerika Latin menunjukkan pentingnya pembentukan komite teknis lokal yang terdiri dari *focal points* pemerintah dan organisasi internasional, pembuatan program operasional tahunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta implementasi sekolah berkelanjutan yang mengintegrasikan komunitas pendidikan, adopsi makanan sehat dan berbudaya, implementasi kebun sekolah edukatif, dan pembelian langsung produk pertanian keluarga.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, integrasi MBG dengan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual dan penguatan karakter melalui 8 dimensi profil lulusan membuka peluang transformatif untuk menjadikan program ini sebagai instrumen strategis peningkatan mutu pendidikan.

Namun, implementasi MBG masih terhambat oleh kebutuhan akan pemahaman mendalam tentang bagaimana sekolah mengelola kolaborasi *multi-Stakeholder* dalam praktik. Gap ini sangat krusial mengingat teori *Stakeholder* menegaskan bahwa keberhasilan program bergantung pada kemampuan mengelola hubungan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan (Freeman, 1984; Peng et al., 2024).

Penelitian terkini tentang kolaborasi *Stakeholder* dalam manajemen sekolah menunjukkan bahwa partisipasi aktif *Stakeholder* dalam pengambilan keputusan memberikan dampak positif terhadap efektivitas manajemen dan kinerja siswa, namun tantangan muncul dalam mengelola beragam kepentingan dan memastikan keterlibatan semua pihak secara seimbang (Jaenudin, 2024). Analisis *Stakeholder mapping* dalam implementasi kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa keterlibatan *Stakeholder* sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan program, dimana *Stakeholder* dapat dikategorisasi berdasarkan *power-interest grid* menjadi *subject*, *player*, *crowd*, dan *context setter* yang masing-masing memerlukan strategi pengelolaan yang berbeda (Restianingati, 2024).

Dari perspektif Manajemen Pendidikan, penelitian ini memposisikan kolaborasi *Stakeholder* dalam kerangka fungsi manajerial klasik yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pengendalian. Perspektif manajemen pendidikan kontemporer menekankan bahwa kolaborasi adalah dimensi esensial dalam pengelolaan lembaga pendidikan modern yang memungkinkan keempat fungsi manajerial tersebut berjalan secara sinergis (Rasidi et al., 2022).

Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana manajemen kolaborasi *Stakeholder* di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif-analitik. Tujuan penelitian adalah menganalisis dan mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi pengendalian kolaborasi *Stakeholder* sebagai sistem manajemen yang ada, untuk kemudian memberikan rekomendasi perbaikan sistem manajemen kolaborasi *Stakeholder* yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat, sebuah sekolah dasar negeri di kawasan urban Bekasi Barat dengan karakteristik yang representatif untuk menggambarkan kompleksitas implementasi Program MBG di Indonesia. Pemilihan lokus penelitian didasarkan pada lima pertimbangan strategis. Pemilihan SDN Kota Baru IX Bekasi Barat sebagai lokus penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik dan empiris. Pertama, sekolah ini merupakan salah satu satuan pendidikan dasar yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis, sehingga relevan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pemenuhan gizi diterjemahkan dalam praktik manajemen sekolah. Kedua, pelaksanaan Program MBG di sekolah ini memiliki keterkaitan dengan proses pembelajaran, terutama melalui penguatan pemahaman siswa tentang makanan sehat, gizi seimbang, kedisiplinan, serta pembiasaan perilaku hidup sehat yang sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ketiga, implementasi Program MBG di SDN Kota Baru IX melibatkan beragam *Stakeholder*, baik dari unsur internal sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan peserta didik, maupun unsur eksternal seperti SPPG, orang tua, komite sekolah, dinas terkait, ahli gizi, serta pemasok lokal/UMKM. Keragaman aktor tersebut menunjukkan adanya ekosistem kolaboratif yang sesuai dengan fokus penelitian ini, yaitu manajemen kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG Di Pendidikan Dasar. Keempat, sekolah memiliki pengalaman implementasi berbagai inovasi dalam manajemen sekolah, termasuk sistem informasi manajemen sekolah, program kemitraan dengan orang tua melalui "Sekolah Ramah Keluarga", dan kolaborasi dengan komunitas lokal dalam berbagai program kesehatan dan literasi. Pengalaman ini menjadi modal dasar untuk memahami dinamika kolaborasi *Stakeholder* dalam program gizi, namun implementasi Program MBG membawa kompleksitas baru yang memerlukan model manajemen kolaboratif yang lebih sistematis. Kelima, tantangan nyata dalam koordinasi dan kolaborasi multipihak yang selama ini menjadi hambatan implementasi berbagai program sekolah menjadikan lokasi ini sebagai kasus yang kaya informasi (*information-rich case*) untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kolaborasi serta merumuskan rekomendasi perbaikan sistem manajemen kolaboratif. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan triangulasi data dari wawancara mendalam dan analisis dokumen, penelitian ini berupaya memahami pola manajemen kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG sebagaimana terjadi di

lapangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai *Stakeholder* kunci untuk menggali perspektif, ekspektasi, dan pengalaman mereka. Analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen perencanaan, implementasi, dan evaluasi program untuk memahami mekanisme formal yang telah ada.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem manajemen kolaborasi *Stakeholder* di tingkat sekolah dasar, sekaligus memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi dan panduan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di tingkat nasional.

Penelitian ini juga merespons kebutuhan praktis dalam konteks implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 2 (*Zero Hunger*), SDG 3 (*Good Health and Well-being*), dan SDG 4 (*Quality Education*) yang saling berkaitan dan memerlukan pendekatan kolaboratif untuk pencapaiannya.

B. Fokus dan Sub Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai sistem manajemen kolaborasi antara sekolah dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat sekolah dasar.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif studi kasus, penelitian ini mengkaji bagaimana sekolah merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, serta mengevaluasi kolaborasi dengan berbagai *Stakeholder* untuk mendukung keberhasilan serta keberlanjutan MBG di sekolah.

Subfokus penelitian meliputi:

1. Perencanaan kolaborasi *Stakeholder*: Menggali bagaimana perencanaan kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG dirancang, siapa saja yang dilibatkan, bagaimana proses penetapan visi dan tujuan bersama dilakukan.
2. Pengorganisasian kolaborasi *Stakeholder*: Mengkaji bagaimana pengorganisasian kolaborasi dilakukan, termasuk struktur organisasi kolaboratif, pembagian peran dan tanggung jawab setiap *Stakeholder*, mekanisme komunikasi, dan sistem pengambilan keputusan.
3. Pelaksanaan kolaborasi *Stakeholder*: Menilai bagaimana kegiatan kolaborasi diterapkan di lapangan, termasuk bentuk-bentuk interaksi antar *Stakeholder*, mekanisme koordinasi, dan dinamika pelaksanaan Program MBG.

4. Evaluasi dan pengendalian kolaborasi *Stakeholder*: Mengkaji mekanisme evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kolaborasi, termasuk sistem monitoring, *feedback mechanism*, dan proses perbaikan berkelanjutan.
5. Faktor pendukung dan penghambat kolaborasi: Mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat proses kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG, baik dari aspek komunikasi, sumber daya, kepemimpinan, partisipasi orang tua, penerimaan siswa, maupun mekanisme evaluasi program.

C. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat?
2. Bagaimana pengorganisasian kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat?
3. Bagaimana pelaksanaan kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat?
4. Bagaimana evaluasi dan pengendalian kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG di SDN Kota Baru IX?

D. Tujuan penelitian

Tujuan Umum

Memberikan gambaran mendalam dan analisis kritis tentang sistem manajemen kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sistem manajemen kolaborasi *Stakeholder* untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Tujuan Khusus

- a. Menganalisis perencanaan kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat.

- b. Menganalisis pengorganisasian kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat.
- c. Menganalisis pelaksanaan kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat.
- d. Menganalisis evaluasi dan pengendalian kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat.
- e. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat.
- f. Merumuskan rekomendasi perbaikan sistem manajemen kolaborasi *Stakeholder* untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program MBG di tingkat sekolah dasar.

E. Kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen pendidikan dengan menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang proses dan dinamika kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi kebijakan pendidikan.
- b. Memperkaya kajian *Stakeholder Theory* dan implementasi kebijakan publik di konteks pendidikan Indonesia, khususnya pada isu gizi, kesehatan, dan kesejahteraan siswa.
- c. Menghasilkan analisis kritis tentang tantangan, faktor pendukung, dan faktor penghambat kolaborasi *multi-Stakeholder* dalam program gizi sekolah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sekolah: Memberikan gambaran mendalam dan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem manajemen kolaborasi *Stakeholder* yang lebih efektif dalam implementasi Program MBG, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.
- b. Bagi pemerintah: Memberikan masukan strategis untuk menyempurnakan panduan, regulasi, dan mekanisme dukungan implementasi Program MBG di tingkat daerah dan nasional, berdasarkan pembelajaran dari praktik lapangan.
- c. Bagi *Stakeholder* lain (orang tua, masyarakat, dunia usaha): Mendorong pemahaman lebih baik tentang peran dan kontribusi masing-masing *Stakeholder*

dalam keberlanjutan Program MBG, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan komitmen mereka.

F. Tujuan penelitian

Tujuan Umum

Memberikan gambaran mendalam dan analisis kritis tentang sistem manajemen kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sistem manajemen kolaborasi *Stakeholder* untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis pengorganisasian kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat.
- d. Mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi dan pengendalian kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat.
- e. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program MBG di SDN Kota Baru IX Bekasi Barat.
- f. Merumuskan rekomendasi perbaikan sistem manajemen kolaborasi *Stakeholder* untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program MBG di tingkat sekolah dasar.

G. State of the art

State of the art penelitian ini disusun berdasarkan kajian sistematis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik manajemen kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian-penelitian terdahulu dikelompokkan secara tematik untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan riset di bidang ini dan mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang akan diisi oleh penelitian ini.

1. *Thematic Clustering*: Pengelompokan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian sistematis terhadap literatur, penelitian-penelitian terdahulu dikelompokkan ke dalam lima tema utama:

a. Tema 1: Implementasi dan Evaluasi Program Gizi Sekolah (*School feeding Programs*)

Tema ini mencakup penelitian yang mengkaji efektivitas, dampak, dan tantangan implementasi program makan bergizi di sekolah. Beberapa studi awal di Indonesia (misalnya Rahmah, 2025; Basit & Ramadani, 2025; Qomarrullah, 2025) menunjukkan bahwa Program MBG berpotensi meningkatkan status gizi, kehadiran siswa, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Namun, sebagian besar studi tersebut masih bersifat awal (*early studies*) dan perlu verifikasi lebih lanjut terkait publikasi ilmiahnya.

Secara internasional, Roothaert et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan *multi-Stakeholder* dalam *home-grown school feeding* program di Tanzania meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program. Studi Studdert et al. (2004) menekankan pentingnya dukungan pemerintah dan partisipasi komunitas dalam tata kelola program makan sekolah. Selain itu, FAO (2013) melalui studi Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) di Brasil menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan program berskala besar.

b. Tema 2: Kolaborasi dan Kemitraan *Stakeholder* dalam Pendidikan

Tema ini mengkaji pola dan mekanisme kolaborasi antara sekolah dan *Stakeholder*. Ulandari (2024), Darsiman (2022), serta Fajarwati dan Yasin (2024) menunjukkan bahwa kemitraan dengan orang tua, komunitas, dan institusi lain berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Pada konteks internasional, Bali (2024) di Rwanda menemukan bahwa keterlibatan orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi program makan sekolah ($R=0,979$; $p<0,05$). Selain itu, Abadiano et al. (2024) di Filipina menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *school feeding* program sangat dipengaruhi oleh pengalaman guru dalam mengelola kolaborasi dengan berbagai *Stakeholder*.

c. Tema 3: Integrasi Gizi, Kesehatan, dan Pendidikan

Tema ini menyoroti integrasi program gizi dalam sistem pendidikan. Fransisca (2024) menunjukkan bahwa edukasi gizi dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pola makan sehat. Xu et al. (2021) menemukan bahwa integrasi sistemik antara sektor pendidikan dan gizi menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan.

Secara global, Bundy et al. (2023) dalam studi lintas negara menunjukkan bahwa integrasi program kesehatan dan gizi dalam *school feeding* berkontribusi signifikan terhadap peningkatan human capital. Hal ini diperkuat oleh Hodges et al. (2022) yang menekankan pentingnya strategi kolaboratif lintas sektor dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pendidikan.

d. Tema 4: Kearifan Lokal dan Budaya Pangan dalam Program Pendidikan

Tema ini mengeksplorasi peran kearifan lokal dalam program pendidikan. Ervilita dan Mardhiah (2025) serta Utami et al. (2025) menunjukkan bahwa integrasi budaya lokal dapat memperkuat pembelajaran dan ketahanan pangan.

Dalam konteks internasional, penelitian di Chile (2024) menunjukkan bahwa pendekatan interkultural dalam program makan sekolah meningkatkan penerimaan siswa terhadap makanan sehat. Sonnino (2016) menegaskan bahwa keberlanjutan program makan sekolah di Italia sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam tata kelola program.

e. Tema 5: Kurikulum Merdeka dan Pembelajaran Kontekstual

Tema ini berkaitan dengan inovasi kurikulum dan pembelajaran. Azizah et al. (2025) menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif meningkatkan efektivitas program sekolah. Mardiyati et al. (2025) menekankan pentingnya manajemen strategis berbasis integrasi kurikulum. Nurcahya et al. (2024) menunjukkan bahwa evaluasi partisipatif mendukung sekolah sebagai organisasi pembelajar.

Analisis terhadap matriks penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada dampak atau hasil program, sementara aspek manajemen kolaborasi *Stakeholder* sebagai proses strategis belum menjadi fokus utama. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara simultan mengaitkan

implementasi program gizi sekolah dengan Kurikulum Merdeka dan kearifan lokal sebagai konteks pembelajaran dan penerimaan sosial.



Tabel 1.1 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Penelitian & Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama	Keterbatasan	Relevansi dengan Penelitian Ini
1.	Rahmah (2025)	Evaluasi efektivitas Program MBG terhadap status gizi, stunting, konsentrasi, dan kehadiran siswa SD Indonesia	Kajian Pustaka	Program MBG efektif meningkatkan status gizi dan kehadiran siswa	Pendekatan non-empiris, belum mengembangkan model manajemen kolaboratif	Memberikan baseline tentang efektivitas MBG yang perlu didukung oleh model manajemen yang sistematis
2.	Basit & Ramadani (2025)	Dampak ekonomi Program MBG terhadap UMKM, pertanian lokal, dan penghematan rumah tangga	Kuantitatif	Program MBG memiliki multiplier effect positif terhadap ekonomi lokal	Fokus pada aspek ekonomi makro, belum mengkaji aspek manajerial mikro di tingkat sekolah	Menunjukkan pentingnya kolaborasi dengan UMKM lokal sebagai <i>Stakeholder</i> kunci
3.	Qomarrullah (2025)	Dampak jangka panjang MBG terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan	Kualitatif Studi Kasus	Program MBG berdampak positif pada kesehatan dan pendidikan jangka panjang	Fokus pada evaluasi dampak, belum mengembangkan model manajemen sistematis untuk sustainability	Menegaskan urgensi keberlanjutan program yang memerlukan model manajemen kolaboratif yang kuat

4.	Kumalasari (2025)	Analisis yuridis Program MBG sebagai pemenuhan hak konstitusional anak	Yuridis Normatif	Program MBG merupakan kewajiban konstitusional negara	Perspektif hukum, belum memberikan panduan implementasi praktis	Memberikan landasan hukum yang memperkuat urgensi implementasi efektif
5.	Ulandari (2024)	Kemitraan sekolah dengan <i>Stakeholder</i> (orang tua, komunitas, industri) di SMK	Kualitatif	Identifikasi faktor pendukung dan penghambat kemitraan	Konteks SMK dengan karakteristik <i>Stakeholder</i> berbeda, tidak fokus pada program gizi	Memberikan insight tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi di sekolah
6.	Darsiman (2022)	Kolaborasi manajemen berbasis sekolah dengan manajemen pondok pesantren	Kualitatif	Pola kolaborasi meningkatkan efektivitas sekolah	Kolaborasi antar lembaga pendidikan, bukan <i>multi-Stakeholder</i> eksternal	Mengidentifikasi mekanisme kolaborasi yang dapat diadaptasi untuk konteks <i>multi-Stakeholder</i>
7.	Fajarwati & Yasin (2024)	Kemitraan sekolah dengan <i>multi-Stakeholder</i> untuk pendidikan bermutu	Kualitatif Deskriptif	Pentingnya kemitraan dengan berbagai <i>Stakeholder</i>	Belum operasional, tidak spesifik pada Program MBG	Memperkuat pentingnya kemitraan <i>multi-Stakeholder</i> dalam
8.	Roothaert et al. (2021)	Pendekatan <i>multi-Stakeholder</i> dalam home-grown <i>school feeding</i> di Tanzania	<i>Mixed Methods</i>	Pendekatan kolaboratif meningkatkan kualitas, kesetaraan, dan keberlanjutan	Konteks Tanzania, belum disesuaikan dengan sistem pendidikan dan budaya Indonesia	Memberikan model <i>multi-Stakeholder</i> yang dapat diadaptasi dengan kontekstu
9.	Studdert et al. (2004)	Perbandingan tata kelola program makan sekolah di	Studi Komparatif	Pentingnya dukungan pemerintah dan partisipasi komunitas	Studi makro komparatif, belum model mikro implementasi	Mengidentifikasi prinsip-prinsip tata kelola yang dapat diterapkan di tingkat sekolah

		Australia dan Afrika Selatan				
10.	FAO (2013) Brasil PNAE	Koordinasi multi-sektor dalam program makan sekolah skala nasional	Studi Kasus	Koordinasi antar sektor dan partisipasi masyarakat kunci keberlanjutan	Skala nasional masif, belum model untuk tingkat sekolah individual	Menunjukkan <i>best practice</i> koordinasi multi-sektor yang dapat diadaptasi untuk skala mikro
11.	Bali (2024) Rwanda	Peran kolaborasi <i>Stakeholder</i> dalam implementasi <i>school feeding</i> program	<i>Convergent Mixed Methods</i>	Keterlibatan orang tua berpengaruh signifikan ($R=.979, p<0.05$) terhadap implementasi	Konteks Rwanda, fokus dominan pada peran orang tua	Membuktikan pentingnya keterlibatan aktif <i>Stakeholder</i> , khususnya orang tua
12.	Xu et al. (2021)	Integrasi gizi ke dalam sektor pendidikan di negara berpenghasilan rendah-menengah	<i>Literature Review</i>	Integrasi sistemik menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan	Review global, belum spesifik konteks Indonesia	Memberikan kerangka konseptual untuk integrasi gizi-pendidikan
13	Ervilita & Mardhiah (2025)	Kearifan lokal Aceh Jaya dalam kuliner untuk pembelajaran kimia	Kualitatif	Kuliner lokal dapat diintegrasikan dalam pembelajaran sekolah	Fokus pada integrasi pembelajaran, belum pada program gizi sekolah	Menunjukkan potensi integrasi kearifan lokal dalam program sekolah
14	Azizah et al. (2025)	Kepemimpinan kolaboratif dalam meningkatkan efektivitas	Kuantitatif	Kepemimpinan kolaboratif meningkatkan efektivitas perencanaan	Fokus pada kepemimpinan, belum mengembangkan model manajemen	Menegaskan pentingnya kepemimpinan kolaboratif sebagai enabler manajemen kolaboratif

		perencanaan program di SD		dan partisipasi <i>Stakeholder</i>	kolaboratif yang komprehensif	
15	Collaborative Strategies (Hodges et al., 2022)	Strategi kolaboratif untuk <i>nutrition security</i> dan education	Kualitatif	Kolaborasi lintas disiplin paling efektif untuk akses makanan sehat dan pendidikan gizi	Konteks pandemi, belum menghasilkan model operasional jangka panjang	Menunjukkan pentingnya <i>collaborative strategies</i> yang dapat diadaptasi untuk MBG



Berdasarkan kajian sistematis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, teridentifikasi lima gap penelitian yang signifikan:

1. Gap Model Manajemen Operasional

Penelitian terkait MBG masih berfokus pada evaluasi dampak, belum mengembangkan model manajemen implementasi yang operasional dan aplikatif.

2. Gap Kontekstualisasi Kolaborasi

Studi kolaborasi *Stakeholder* belum secara spesifik dikaitkan dengan kompleksitas program gizi sekolah.

3. Gap Adaptasi Konteks Lokal

Studi internasional belum sepenuhnya relevan dengan konteks budaya dan sistem pendidikan Indonesia.

4. Gap Integrasi Kurikulum Merdeka

Belum ada penelitian yang mengaitkan MBG dengan pembelajaran berbasis proyek (P5).

5. Gap Model Holistik-Integratif

Belum terdapat model yang mengintegrasikan aspek manajemen, teknologi, budaya, dan kurikulum dalam satu kerangka operasional.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas program gizi sekolah (Rahmah, 2025; Qomarrullah, 2025), dampak ekonomi Program MBG (Basit & Ramadani, 2025), serta pentingnya kolaborasi *Stakeholder* dalam pendidikan (Ulandari, 2024; Roothaert et al., 2021; Bali, 2024). Namun, belum ada penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana manajemen kolaborasi *Stakeholder* dijalankan dalam praktik implementasi Program MBG yang baru (Januari 2025) dengan integrasi Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar Indonesia. Novelty (Kebaruan) Penelitian Ini yaitu:

1. *Timing* yang Strategis: Penelitian ini dilakukan pada tahun pertama implementasi Program MBG nasional (2025), memberikan gambaran real-time tentang tantangan dan best practices dalam tahap krusial inisiasi program, berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengkaji program yang sudah berjalan lama atau bersifat retrospektif.

2. Konteks Unik Kurikulum Merdeka: Penelitian ini merupakan studi pertama yang mengkaji integrasi Program MBG dengan Kurikulum Merdeka, khususnya melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), membuka peluang transformatif untuk menjadikan program ini sebagai instrumen strategis peningkatan mutu pendidikan holistik.
3. Pendekatan Metodologis Integratif: Penelitian ini menggunakan *framework* integratif lima teori (Manajemen Pendidikan, *Stakeholder Theory*, Kebijakan Publik, Konsep Gizi-Pendidikan, dan Kearifan Lokal) untuk pemahaman holistik, berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung mono-perspektif.
4. Pengembangan Model Operasional: Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan dan menganalisis, tetapi juga bertujuan merumuskan model konseptual hipotetik manajemen kolaborasi *Stakeholder* yang operasional dan berpotensi untuk direplikasi serta diuji lebih lanjut. Model konseptual yang dirumuskan dalam penelitian ini mencakup: (a) struktur organisasi kolaboratif dengan pembagian peran yang jelas, (b) mekanisme koordinasi *multi-Stakeholder* dengan protokol komunikasi, (c) instrumen evaluasi terstandar, (d) integrasi teknologi digital untuk monitoring dan transparansi, (e) kontekstualisasi dengan kearifan lokal Indonesia, dan (f) integrasi dengan pembelajaran berbasis proyek.
5. Kontekstualisasi Kearifan Lokal: Penelitian ini mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia (gotong royong, musyawarah mufakat) dalam model manajemen kolaboratif, yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung mengadopsi *framework* Barat tanpa adaptasi budaya.
6. Fokus pada Keberlanjutan Program: Berbeda dengan penelitian yang fokus pada evaluasi dampak jangka pendek, penelitian ini secara eksplisit mengembangkan mekanisme untuk memastikan keberlanjutan program melalui penguatan kapasitas kolaboratif dan sistem evaluasi partisipatif.

Berdasarkan pemetaan lima tema penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai program gizi sekolah, kolaborasi *Stakeholder*, integrasi gizi dan pendidikan, kearifan lokal, serta Kurikulum Merdeka masih bersifat

terfragmentasi. Belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan kelima aspek tersebut dalam satu kerangka analisis manajemen kolaborasi *Stakeholder* pada implementasi program gizi sekolah sebagai kebijakan baru. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang bersifat konseptual dan empiris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya mengisi celah empiris, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual berupa model manajemen kolaborasi *Stakeholder* dalam implementasi program gizi sekolah yang terintegrasi dengan Kurikulum Merdeka dan kearifan lokal. Model manajemen kolaborasi *Stakeholder* yang dikembangkan dalam penelitian ini akan diuji dan dianalisis lebih lanjut pada bagian hasil penelitian

